



DIROSAT

Journal of Education, Social Sciences & Humanities

Journal website: <https://dirosat.com/>

ISSN : 2985-5497 (Online)

DOI: <https://doi.org/10.58355/dirosat.v4i2.245>

Vol. 4 No. 2 (2026)

pp. 299-308

Research Article

Manajemen Pendanaan Biaya Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah di Kecamatan Bluto

Mubayyinah, Yusfar Ramadhan

Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah,
Universitas Al-Amien Prenduan, Sumenep, Madura, Indonesia

Corresponding Author, E-mail: mubayayin@gmail.com (Mubayyinah)



Copyright © 2026 by Authors, Published by **DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 27, 2026

Revised : June 24, 2026

Accepted : July 16, 2026

Available online : August 29, 2026

How to Cite: Mubayyinah, M., & Yusfar Ramadhan. (2026). Management of Operational Education Funding Costs Diniyah Madrasah in Bluto District. *DIROSAT: Journal of Education, Social Sciences & Humanities*, 4(2), 299–308. <https://doi.org/10.58355/dirosat.v4i2.245>

Management of Operational Education Funding Costs Diniyah Madrasah in Bluto District

Abstract. This study analyzes the management of educational operational funding in Madrasah Diniyah in Bluto District, focusing on fundraising mechanisms, the management of Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), and financial accountability and innovation. A qualitative multisite case-study design was employed at three institutions: Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Mashlahatul Hidayah Errabu, Madrasah Diniyah Ula Nurul Yaqin Pakandangan Barat, and Madrasah Diniyah Takmiliyah At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation and analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing, supported by triangulation. The findings indicate that all three madrasahs use multiple funding sources involving government assistance, parents or guardians, community contributions, donors, and institutional partnerships. Financial stability differs across sites: At-

Taufiqiyah is relatively more stable because of regular tuition, government assistance, BPPDGS, and Baitul Mal At-Taufiqiyah, whereas Mashlahatul Hidayah and Nurul Yaqin remain vulnerable to incidental community donations and uncertain government disbursement. BOP management is generally aligned with applicable technical guidelines through EMIS data updating, participatory planning, priority-based spending, documentation, and reporting. Major constraints include administrative complexity, limited human-resource capacity, data accuracy, and irregular disbursement schedules. Accountability functions not only as an administrative requirement but also as social capital for strengthening public trust. Innovations such as a honesty-based canteen and entrepreneurial bazaars indicate an emerging pathway toward financial independence.

Keywords: educational funding management; operational education costs; Madrasah Diniyah; BOP; fundraising; accountability

Abstrak. Penelitian ini menganalisis manajemen pendanaan biaya operasional pendidikan pada Madrasah Diniyah di Kecamatan Bluto dengan fokus pada mekanisme pencarian dana (fundraising), manajemen penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), serta akuntabilitas dan inovasi pendanaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus multisitus pada tiga lembaga, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Mashlahatul Hidayah Errabu, Madrasah Diniyah Ula Nurul Yaqin Pakandangan Barat, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja, Kecamatan Bluto, Sumenep. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga madrasah menerapkan pola pendanaan multisumber yang melibatkan bantuan pemerintah, kontribusi wali santri, masyarakat, donatur, dan pada kasus tertentu kemitraan kelembagaan. Tingkat stabilitas pendanaan berbeda: At-Taufiqiyah relatif lebih stabil karena ditopang SPP rutin, bantuan pemerintah, BPPDGS, dan Baitul Mal At-Taufiqiyah; sedangkan Mashlahatul Hidayah dan Nurul Yaqin masih menghadapi ketidakpastian karena kontribusi masyarakat cenderung insidental dan pencairan bantuan pemerintah tidak selalu tepat waktu. Penggunaan BOP secara umum telah diarahkan sesuai petunjuk teknis melalui pemutakhiran data EMIS, perencanaan partisipatif, penggunaan berdasarkan prioritas, pencatatan, dan pelaporan. Kendala utama meliputi kompleksitas administrasi, keterbatasan kapasitas SDM, akurasi data, dan ketidakpastian waktu pencairan. Praktik akuntabilitas terbukti berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai modal sosial untuk membangun kepercayaan publik. Inovasi seperti Kantin Kejujuran dan bazar kewirausahaan menunjukkan arah penguatan kemandirian finansial madrasah.

Kata kunci: manajemen pendanaan; biaya operasional pendidikan; Madrasah Diniyah; BOP; fundraising; akuntabilitas

PENDAHULUAN

Madrasah Diniyah memiliki posisi strategis dalam ekosistem pendidikan Islam Indonesia karena berfungsi melengkapi pendidikan formal melalui penguatan pengetahuan agama, pembentukan karakter, dan transmisi tradisi keislaman. Keberadaan lembaga ini memperoleh ruang dalam sistem pendidikan nasional, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun, pengakuan normatif tersebut belum selalu diikuti oleh kondisi kelembagaan yang memadai. Sejumlah Madrasah Diniyah masih menghadapi persoalan kurikulum, sumber daya manusia, sarana-prasarana, tata kelola, dan terutama pendanaan (Hanafiah, 2020; Musayyidi, 2025).

Pendanaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan layanan pendidikan. Pendidikan tidak hanya memerlukan biaya untuk proses pembelajaran, tetapi juga untuk pemeliharaan sarana, administrasi, pengembangan guru, penyediaan bahan ajar, dan kegiatan kelembagaan. Karena itu, manajemen pembiayaan tidak cukup dipahami sebagai kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, melainkan sebagai rangkaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Komariah, 2018; Rusdiana, 2021).

Literatur tentang pendanaan pendidikan Islam menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pada dasarnya dapat berasal dari pemerintah, peserta didik atau orang tua, serta masyarakat dalam bentuk donasi, zakat, wakaf, sedekah, hibah, dan bentuk dukungan sosial lainnya (Diana et al., 2023; Warmanto, 2024). Diversifikasi sumber dana penting karena ketergantungan pada satu sumber akan meningkatkan kerentanan lembaga ketika sumber tersebut terlambat atau berkurang. Studi tentang fundraising pada lembaga pendidikan Islam juga menunjukkan pentingnya strategi penggalangan dana yang terencana, jejaring sosial, dan penguatan kapasitas pengelola (Karim, 2025; Hidayah et al., 2025).

Konteks Kecamatan Bluto menarik karena terdapat Madrasah Diniyah dengan karakter pendanaan yang berbeda. Madrasah Diniyah Ula Nurul Yaqin Pakandangan Barat dikenal menerapkan pendidikan tanpa pembayaran SPP rutin sehingga sumber dana sangat terbatas. Madrasah Diniyah Takmiliah Ula Mashlahatul Hidayah Errabu memperoleh dukungan dari masyarakat, donatur, dan bantuan pemerintah, tetapi kestabilannya belum sepenuhnya terjamin. Sementara itu, Madrasah Diniyah Takmiliah At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja memiliki sumber dana yang relatif lebih stabil melalui SPP santri, bantuan pemerintah, BPPDGS, serta dukungan Baitul Mal At-Taufiqiyah.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberagaman sumber dana belum otomatis menghasilkan keberlanjutan finansial. Kualitas manajemen, kemampuan administratif, ketepatan perencanaan, transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan membangun kemitraan ikut menentukan apakah sumber dana yang tersedia benar-benar mampu menopang operasional lembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat berapa banyak sumber dana yang dimiliki, tetapi juga bagaimana dana dicari, direncanakan, digunakan, dipertanggungjawabkan, dan dikembangkan menjadi sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama: (1) mekanisme dan sumber pencarian dana (fundraising) Madrasah Diniyah di Kecamatan Bluto; (2) manajemen penggunaan dana BOP sesuai petunjuk teknis yang berlaku; dan (3) penggunaan, pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta inovasi pendanaan pada ketiga lembaga tersebut. Fokus ini diharapkan memberikan gambaran komparatif mengenai pola pendanaan Madrasah Diniyah berbasis masyarakat sekaligus merumuskan arah penguatan kemandirian finansial yang tetap sesuai dengan karakter kelembagaan pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus multisitus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami praktik manajemen pendanaan secara mendalam dalam konteks alamiah lembaga, termasuk pengalaman pengelola, proses pengambilan keputusan, kendala administratif, serta strategi yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan pendanaan. Rancangan multisitus memungkinkan perbandingan pola pengelolaan pada beberapa Madrasah Diniyah yang memiliki konteks sosial relatif berdekatan tetapi karakter pendanaan berbeda.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, dengan tiga situs penelitian: MDT Ula Mashlahatul Hidayah Errabu, MDT Ula Nurul Yaqin Pakandangan Barat, dan MDT At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja. Pemilihan ketiga situs didasarkan pada perbedaan karakter sumber pendanaan dan tingkat stabilitas operasional yang ditemukan peneliti.

Sumber data primer berasal dari pengelola dan pihak terkait pada masing-masing lembaga. Pada MDT Mashlahatul Hidayah informan meliputi kepala madrasah, operator, komite, bendahara, guru, serta wali santri/masyarakat. Pada MDT Nurul Yaqin informan meliputi kepala madrasah, operator, bendahara, dan pengajar. Pada MDT At-Taufiqiyah informan meliputi kepala madrasah, operator, dan bendahara. Data sekunder diperoleh dari dokumen perencanaan anggaran, laporan keuangan, dokumen pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan, serta literatur yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali mekanisme fundraising, proses pengajuan dan penggunaan BOP, kendala pengelolaan, serta strategi akuntabilitas dan inovasi. Observasi digunakan untuk melihat praktik pengelolaan secara langsung, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memeriksa bukti administratif dan dokumen keuangan yang relevan.

Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tiga fokus penelitian kemudian dibandingkan antar-situs untuk menemukan pola persamaan dan perbedaan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, serta konfirmasi kepada informan. Dengan cara tersebut, temuan yang disajikan dalam artikel merupakan sintesis dari data lapangan dan dokumen penelitian, bukan generalisasi statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme dan Sumber Pencarian Dana (Fundraising)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga Madrasah Diniyah menggunakan pola pendanaan multisumber. Sumber tersebut mencakup bantuan pemerintah melalui BOP dan/atau BPPDGS, kontribusi wali santri, donatur, masyarakat, serta kemitraan kelembagaan. Namun, keberagaman sumber tidak sama dengan keberlanjutan sumber. Perbedaan utama antar-madrasah terletak pada tingkat keteraturan, kemampuan diversifikasi, dan kekuatan jejaring pendanaan.

Pada MDT Mashlahatul Hidayah Errabu, dana diperoleh dari sumbangan masyarakat sekitar dan wali santri, donatur tetap, serta bantuan pemerintah melalui BOP. Sumbangan masyarakat cenderung bersifat sukarela dan insidental, misalnya digalang ketika terdapat kegiatan keagamaan atau kebutuhan mendesak. BOP menjadi salah satu penopang operasional dasar seperti listrik, air, dan honor minimal guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga telah memiliki sumber yang beragam, tetapi belum seluruhnya dapat diprediksi dalam perencanaan jangka panjang.

MDT Nurul Yaqin Pakandangan Barat menunjukkan kondisi yang lebih rentan. Lembaga tidak menerapkan pembayaran SPP rutin dan banyak mengandalkan sumbangan wali santri, donatur, serta bantuan pemerintah yang waktu pencairannya tidak selalu pasti. Keterbatasan tersebut berdampak pada kemampuan lembaga memenuhi kebutuhan operasional dan kesejahteraan guru. Dalam temuan lapangan bahkan muncul istilah GULITA (Guru Lillahi Ta'ala) sebagai gambaran adanya guru yang tetap mengajar dalam kondisi kompensasi yang sangat terbatas.

Berbeda dengan dua lembaga tersebut, MDT At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja memiliki struktur pendanaan relatif stabil. SPP santri menjadi sumber rutin, sementara bantuan pemerintah dan BPPDGS berfungsi sebagai sumber tambahan. Lembaga juga memiliki Baitul Mal At-Taufiqiyah (BMA) yang membantu kebutuhan santri dari keluarga kurang mampu. Selain itu, madrasah mengembangkan bazar kewirausahaan dan memanfaatkan jaringan alumni sebagai sumber dukungan. Pola tersebut memperlihatkan adanya kombinasi sumber rutin, eksternal, dan alternatif.

Perbandingan ketiga situs menunjukkan bahwa stabilitas pendanaan lebih ditentukan oleh keteraturan dan sinergi antar-sumber daripada sekadar jumlah sumber. At-Taufiqiyah memiliki keseimbangan antara kontribusi internal melalui SPP, bantuan pemerintah, dan kemitraan sosial. Sebaliknya, Mashlahatul Hidayah dan Nurul Yaqin lebih terpapar risiko ketidakpastian karena kontribusi masyarakat bersifat insidental dan bantuan pemerintah tidak selalu cair sesuai kebutuhan operasional.

Tabel 1. Perbandingan karakter pendanaan tiga Madrasah Diniyah di Kecamatan Bluto

Lembaga	Sumber utama	Stabilitas	Karakter strategi
MDT Mashlahatul Hidayah Errabu	BOP, masyarakat/wali santri, donatur	Sedang/berfluktuasi	Multisumber; mulai mengembangkan Kantin Kejujuran
MDT Nurul Yaqin Pakandangan Barat	Wali santri, donatur, bantuan pemerintah	Rendah/fluktuatif	Ketergantungan tinggi pada sumber eksternal dan sumbangan sporadis
MDT At-Taufiqiyah Aeng Baja Raja	SPP, BOP/BPPDGS, BMA, alumni	Relatif stabil	Diversifikasi; kemitraan sosial dan bazar kewirausahaan

Manajemen Penggunaan Dana BOP dan Kepatuhan terhadap Petunjuk Teknis

Pada aspek penggunaan BOP, ketiga madrasah pada prinsipnya berupaya mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Proses pengajuan diawali dengan pemutakhiran data lembaga melalui EMIS, penyusunan dokumen pendukung, pengajuan secara daring, verifikasi oleh pihak Kementerian Agama, dan pencairan ke rekening lembaga setelah proses administrasi dinyatakan memenuhi persyaratan. Dana kemudian digunakan berdasarkan rencana anggaran dan kebutuhan prioritas madrasah.

MDT Nurul Yaqin menonjol dalam pembentukan tim pelaksana khusus untuk mengelola proses administrasi BOP. Pola ini membantu membagi tugas dari tahap persiapan, pengajuan, penggunaan, sampai pelaporan. Sementara itu, MDT Mashlahatul Hidayah dan MDT At-Taufiqiyah lebih menekankan perencanaan partisipatif melalui musyawarah yang melibatkan kepala madrasah, bendahara, guru, dan unsur komite atau pengurus.

Penggunaan dana diarahkan pada kebutuhan yang terkait langsung dengan keberlangsungan pembelajaran dan operasional lembaga, seperti bahan ajar atau kitab, alat tulis, pemeliharaan sarana, kebutuhan listrik dan air, serta honor atau insentif guru sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa dana BOP diposisikan bukan sekadar sebagai bantuan administratif, tetapi sebagai instrumen untuk menjaga kesinambungan layanan pendidikan.

Meskipun demikian, implementasi BOP menghadapi hambatan yang relatif serupa. Pertama, persyaratan administratif cukup kompleks dan dapat berubah. Kedua, pengelola belum seluruhnya memiliki kapasitas administrasi keuangan yang kuat. Ketiga, akurasi data EMIS menjadi faktor penting karena kesalahan data dapat memengaruhi proses pengajuan dan verifikasi. Keempat, waktu pencairan tidak selalu sesuai dengan ritme kebutuhan operasional. Pada MDT At-Taufiqiyah, keterlambatan pencairan bahkan mendorong penggunaan dana talangan dari BMA untuk menjaga kegiatan rutin.

Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga dengan kemampuan organisasi mengubah dana menjadi layanan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan partisipatif membantu lembaga menghindari penggunaan dana secara sepihak, sedangkan pembagian tugas administratif meningkatkan keteraturan proses pengajuan dan pelaporan.

Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Dana

Akuntabilitas menjadi salah satu pola penting yang ditemukan pada ketiga lembaga. Pengelola madrasah berupaya mencatat penerimaan dan pengeluaran, menyimpan bukti transaksi, menyusun laporan penggunaan dana, serta menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Praktik ini sejalan dengan prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Pada MDT Mashlahatul Hidayah, proses perencanaan dan pelaporan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan unsur internal madrasah dan komite.

Laporan tidak hanya diarahkan kepada instansi pemberi bantuan, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat madrasah. Pola ini menunjukkan bahwa akuntabilitas mulai bergeser dari sekadar pemenuhan tuntutan administratif menuju mekanisme membangun kepercayaan.

MDT Nurul Yaqin dan MDT At-Taufiqiyah juga menunjukkan praktik pencatatan transaksi yang rinci, penggunaan bukti pengeluaran yang sah, serta pelaporan kepada pengurus dan wali santri. Keterbukaan tersebut penting karena sebagian sumber dana berasal dari masyarakat atau wali santri. Semakin jelas informasi tentang penggunaan dana, semakin mudah masyarakat menilai apakah kontribusinya digunakan sesuai tujuan pendidikan.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, akuntabilitas dapat berfungsi sebagai modal sosial. Ketika pengelola mampu menunjukkan bahwa dana dikelola secara tertib dan dapat diverifikasi, kepercayaan publik dapat meningkat. Kepercayaan tersebut kemudian berpotensi memperkuat partisipasi masyarakat dan membuka peluang dukungan baru. Karena itu, akuntabilitas tidak seharusnya dipahami sebagai beban administrasi semata, melainkan sebagai strategi keberlanjutan lembaga.

Inovasi Pendanaan dan Arah Kemandirian Finansial

Temuan yang menonjol dalam penelitian adalah mulai munculnya kesadaran bahwa bantuan pemerintah dan sumbangan masyarakat tidak cukup dijadikan satu-satunya fondasi pendanaan jangka panjang. MDT Mashlahatul Hidayah mengembangkan Kantin Kejujuran sebagai usaha mandiri berskala kecil. Keuntungan bersih diarahkan menjadi tambahan kas madrasah, sedangkan pengelolaannya sekaligus menjadi media pendidikan karakter, tanggung jawab, dan kewirausahaan bagi santri.

MDT At-Taufiqiyah mengembangkan bazar kewirausahaan pada kegiatan akhir tahun serta memanfaatkan jaringan alumni. Bazar tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan fundraising, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bagi santri mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan kewirausahaan. Madrasah juga merencanakan penguatan unit usaha kecil dan koperasi santri sebagai alternatif pendanaan.

Sementara itu, MDT Nurul Yaqin masih lebih terbatas dalam inovasi pendanaan. Keterbatasan SDM, modal awal, dan perencanaan strategis menjadi hambatan pengembangan unit usaha. Oleh karena itu, kebutuhan yang muncul bukan hanya tambahan dana, tetapi juga peningkatan kapasitas pengelola dalam pembukuan, fundraising, komunikasi publik, dan pemanfaatan teknologi untuk donasi.

Dari ketiga situs dapat dirumuskan bahwa kemandirian finansial tidak harus berarti melepaskan bantuan pemerintah. Kemandirian lebih tepat dipahami sebagai kemampuan lembaga membangun portofolio sumber dana yang seimbang sehingga keterlambatan atau berkurangnya satu sumber tidak langsung mengganggu operasional. Model tersebut dapat menggabungkan BOP/BPPDGS, kontribusi wali santri, donatur, unit usaha, alumni, dan kemitraan sosial secara proporsional.

Sintesis Lintas Kasus: Dari Pendanaan Multisumber menuju Keberlanjutan

Secara lintas kasus, penelitian menemukan adanya kesenjangan antara keberagaman sumber dana dan keberlanjutan pendanaan. Ketiga madrasah telah memiliki lebih dari satu sumber dana, tetapi hanya At-Taufiqiyah yang menunjukkan kombinasi sumber yang relatif stabil. Temuan ini penting karena diversifikasi yang tidak disertai keteraturan, perencanaan, dan kemitraan jangka panjang belum cukup untuk menghasilkan ketahanan finansial.

Pada tingkat kelembagaan, terdapat tiga faktor yang membedakan stabilitas pendanaan. Pertama, kemampuan membangun sumber rutin. SPP santri di At-Taufiqiyah memberikan arus kas yang lebih dapat diprediksi dibandingkan sumbangan insidental. Kedua, kekuatan jejaring. Kehadiran BMA dan alumni menciptakan dukungan sosial yang lebih terstruktur. Ketiga, kapasitas manajerial. Perencanaan partisipatif, pembukuan, dokumentasi, dan pelaporan memungkinkan dana yang terbatas tetap diarahkan kepada kebutuhan prioritas.

Temuan tersebut selaras dengan kajian yang menempatkan fundraising sebagai bagian dari manajemen strategis, bukan kegiatan pengumpulan dana yang bersifat spontan. Lembaga pendidikan Islam perlu membangun relasi dengan masyarakat, alumni, pemerintah, dan mitra sosial melalui komunikasi yang transparan dan menunjukkan dampak penggunaan dana (Karim, 2025; Hidayah et al., 2025). Pada konteks Madrasah Diniyah, strategi tersebut perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat pedesaan, kemampuan ekonomi wali santri, dan kultur gotong royong yang menjadi modal sosial lembaga.

Implikasi praktis penelitian adalah perlunya model penguatan pendanaan berbasis tiga lapis. Lapis pertama adalah sumber rutin internal, seperti SPP atau kontribusi yang disepakati secara proporsional. Lapis kedua adalah sumber eksternal terencana, seperti BOP, BPPDGS, donatur tetap, alumni, dan kemitraan Baitul Mal. Lapis ketiga adalah sumber inovatif, seperti unit usaha, bazar, koperasi santri, atau donasi digital. Ketiga lapis tersebut harus ditopang sistem pembukuan, perencanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan yang profesional.

Namun demikian, model tersebut bukanlah hasil pengujian kuantitatif dan tidak dapat digeneralisasikan secara statistik kepada seluruh Madrasah Diniyah. Model ini merupakan sintesis kontekstual dari tiga situs penelitian di Kecamatan Bluto dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan untuk menguji efektivitasnya pada wilayah atau lembaga yang lebih luas.

SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendanaan Madrasah Diniyah di Kecamatan Bluto memiliki pola multisumber, tetapi tingkat stabilitas dan kemandiriannya berbeda. MDT At-Taufiqiyah relatif lebih stabil karena memiliki kombinasi SPP rutin, bantuan pemerintah, BPPDGS, Baitul Mal At-Taufiqiyah, dan dukungan alumni. MDT Mashlahatul Hidayah memiliki sumber yang cukup beragam, tetapi sebagian masih bersifat insidental. MDT Nurul Yaqin menghadapi kerentanan paling tinggi karena keterbatasan kontribusi rutin dan ketergantungan pada sumbangan serta bantuan yang tidak selalu pasti.

Manajemen penggunaan BOP secara umum telah diarahkan sesuai petunjuk teknis melalui pemutakhiran EMIS, pengajuan administratif, perencanaan partisipatif, penggunaan berdasarkan kebutuhan prioritas, pencatatan, dan pelaporan. Kendala utama terletak pada kompleksitas administrasi, keterbatasan kapasitas SDM, akurasi data, dan ketidakpastian waktu pencairan. Dengan demikian, penguatan kapasitas pengelola sama pentingnya dengan penambahan volume dana.

Akuntabilitas dan transparansi terbukti memiliki posisi strategis karena tidak hanya memenuhi tuntutan pertanggungjawaban kepada pemerintah, tetapi juga membangun kepercayaan wali santri dan masyarakat. Inovasi pendanaan melalui Kantin Kejujuran, bazar kewirausahaan, jejaring alumni, dan rencana pengembangan unit usaha menunjukkan arah baru menuju kemandirian finansial.

Ke depan, Madrasah Diniyah perlu mengembangkan strategi pendanaan yang terdiversifikasi, terencana, dan berkelanjutan dengan memperkuat sumber rutin internal, kemitraan eksternal, unit usaha produktif, kapasitas pembukuan, fundraising profesional, dan pemanfaatan teknologi donasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan juga perlu memperkuat pendampingan administratif agar bantuan operasional lebih mudah diakses dan pencairannya lebih selaras dengan kebutuhan lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimah, S., & Khalimah, N. (2023). Analisis manajemen pembiayaan pendidikan melalui syahriah terpadu di Pesantren Darussalam Blokagung. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 5(2), 256–274.
- Amelia, A., Sari, M., & Afrizal, F. (2025). Manajemen keuangan dan implementasinya dalam pengelolaan lembaga pendidikan. *Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 14–28.
- Armaluddin, U. (2022). Manajemen pembelajaran dalam peningkatan mutu madrasah diniyah. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 27–36.
- Asbari, M. (2024). Madrasah Diniyyah Takmiliyah: Pilar pendidikan karakter di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), 10–14.
- Azis, A., Iswanto, P., & Selamat, S. (2023). Penguatan kesadaran pentingnya pembiayaan pendidikan Madrasah Diniyah melalui pengembangan kapasitas komunitas di Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. *Khidmat*, 3(1), 1–13.
- Diana, M. R., Ferdian, F., & Munir, M. (2023). Pengembangan sumber dan alokasi pendanaan pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3).
- Hanafiah, Y. (2020). Madrasah Diniyah: Antara realitas, political will, dan political action. *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 35–61.
- Hidayah, K. R. N., Bariroh, U., & Fahrurrozi, F. (2025). Strategi efektif fundraising pada lembaga pendidikan Islam swasta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 1011–1019.
- Karim, H. A. (2025). Fundraising strategies for private madrasahs to improve service quality. *AJMIE: Alhikam Journal of Multidisciplinary Islamic Education*, 6(1).
- Komariah, N. (2018). Konsep manajemen keuangan pendidikan. *Al-Afkar: Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 67–94.

- Luthfi, M. H., & Rosi, F. (2025). Manajemen kepala madrasah dalam mengembangkan kualitas pendidikan. *Tarunaedu: Journal of Education and Learning*, 3(2), 60–77.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (terj. Tjetjep Rohindi Rohidi). Jakarta: UI Press.
- Muhaemin. (2012). Problematika Madrasah Diniyah (MD) di Kota Palopo Sulawesi Selatan pasca otonomi daerah. *INFERENSI*, 6(2), 159.
- Musayyidi. (2025). Problem dan solusi Madrasah Diniyah: Kajian manajemen dan kebijakan Madin dalam Permenag Nomor 13 Tahun 1964. Kariman: *Jurnal Pendidikan Keislaman*, 13(1), 73–87.
- Rusdiana, M. M. (2021). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Filosofi, konsep, dan aplikasi*. Bandung: Tresna Bhakti Press.
- Rusdiana, M. M., & Kodir, H. A. (2022). *Pengelolaan Madrasah Diniyah kontemporer*. MDP.
- Sholeh, M. I. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam membangun citra positif melalui manajemen pendidikan yang berkualitas. *Tadbiruna*, 3(1), 43–55.
- Sugiyono. (2016). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Warmanto, E. (2024). Pembiayaan pendidikan Islam. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1).
- Wahyudin, U. R. (2021). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Pendekatan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas*. Deepublish.